



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2020



Negara berkewajiban melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam era keterbukaan informasi saat ini, mendapatkan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan kebutuhan dasar setiap masyarakat. Serta kewajiban Pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat terbebas dari informasi yang sesat dan menyimpang.



Dalam era konvergensi media, dimana arus informasi menjadi tidak dapat dibendung lagi, banyak kanal yang memungkinkan masyarakat untuk terpapar informasi. Bahkan setiap bagian dari masyarakat bisa menjadi sumber informasi atau yang sekarang dikenal dengan istilah citizen journalism. Dalam era digitalisasi dan media sosial, tidak hanya akun yang memiliki kredibilitas yang bisa menyusun narasi terkait kejadian tertentu, namun akun-akun anonim juga memiliki keleluasaan yang sama untuk menerbitkan tulisan dengan tema yang sedang diperbincangkan.



Salah satu kekuatan media lainnya yang harus diwaspadai oleh pemerintah adalah share informasi dengan hanya sekali klik. Informasi dapat dengan mudah menyebar dari satu lini massa ke lini massa lainnya hanya dengan menekan tombol forward. Celaknya, tidak semua penerima informasi tersebut membaca informasi dengan seksama, banyak pula yang hanya membaca sebagian namun meneruskan informasi tersebut begitu saja.

Sebagaimana Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 7 Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah dan sesuai Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015, Kementerian Dalam Negeri menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Peraturan ini merupakan pengganti peraturan sebelumnya, yakni: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kementerian Dalam Negeri juga telah menghimpun masukan dan saran dari Pemerintah Daerah dan masyarakat melalui berbagai kegiatan kolaborasi yang dilakukan selama tahun 2020. Hasil dari kegiatan rapat-rapat koordinasi dimaksud salah satunya adalah usulan revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 khususnya yang mengatur tentang struktur dan kelembagaan PPID dan standar prosedur operasional Layanan Informasi. Revisi Permendagri No. 3 Tahun 2017 tersebut akan diselaraskan dengan Rancangan Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik yang sedang dibahas. Sehingga dapat menghasilkan aturan yang digunakan sebagai pedoman baik bagi Kementerian Dalam Negeri maupun Pemerintah Daerah.





Pelaksanaan tugas dan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu yang transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan dan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Pengelolaan pelayanan informasi publik oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah melekat pada jabatan struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi dan/atau kehumasan yang berkedudukan sebagai PPID Utama.

Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, PPID Utama dijabat oleh Kepala Pusat Penerangan. PPID Utama bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal dan berkoordinasi dengan PPID Pembantu yang berada di Komponen Kerja Kemendagri sebagai pihak yang menguasai informasi.



Pengelolaan pelayanan informasi publik oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah melekat pada jabatan struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi dan/atau kehumasan yang berkedudukan sebagai PPID Utama.

Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, PPID Utama dijabat oleh Kepala Pusat Penerangan. PPID Utama bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal dan berkoordinasi dengan PPID Pembantu yang berada di Komponen Kerja Kemendagri sebagai pihak yang menguasai informasi.

Susunan dan Kedudukan Keanggotaan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 489.05-2039 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Tim sebagaimana dimaksud terdiri atas:



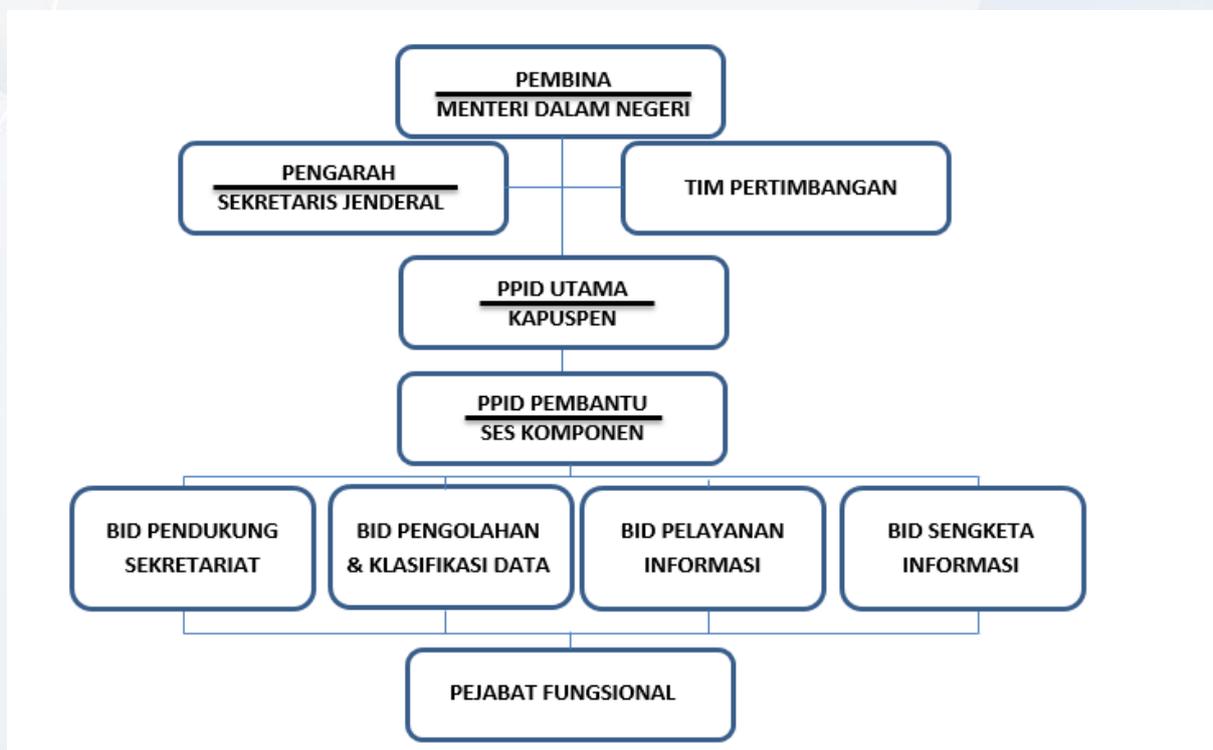
- a. Pembina;
- b. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Utama; dan
- c. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu.

Struktur Organisasi PLID Kementerian Dalam Negeri menempatkan Menteri Dalam Negeri sebagai Pembina PPID, Sekretaris Jenderal sebagai Atasan PPID, Pejabat Eselon I dari setiap komponen di Kementerian Dalam Negeri beserta dengan Kepala Biro Hukum sebagai Tim Pertimbangan, Kepala Pusat Penerangan sebagai PPID Utama dan Sekretaris setiap komponen dan unit Kementerian Dalam Negeri sebagai PPID Pembantu dimana masing-masing komponen

memiliki Person in charge (PIC) sebagai pelaksana fungsional yang mengoperasikan administrasi bisnis pelayanan informasi publik sebagai admin aplikasi PPID Kementerian Dalam Negeri yang aktif.

Dalam rangka menjalankan fungsi teknis, PPID Utama berperan dalam proses konsultasi, koordinasi serta evaluasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, disamping berkoordinasi dengan atasan PPID. PPID Utama dan Pelaksana berkoordinasi dengan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, baik sebagian maupun seluruhnya, dalam proses pengklasifikasian informasi, utamanya proses penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).

Untuk lebih memahami alur koordinasi dan struktur PPID pada Kementerian Dalam Negeri, Berikut digambarkan bagan Struktur Organisasi PPID di Kementerian Dalam Negeri.



2.1 Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Kementerian Dalam Negeri telah didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Semua permohonan informasi baik yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung telah diakomodir sedemikian rupa agar sesuai dengan standar layanan informasi publik yang telah ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat. Fasilitas yang tersedia dalam mendukung Pelayanan informasi dan dokumentasi publik, terdiri dari:

1. Ruang Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi secara langsung ke Kementerian Dalam Negeri (foto pada lampiran). Ruang dilengkapi sarana dan prasarana seperti:
 - a. 4 Kursi Tamu
 - b. Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi
 - c. 2 unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet
 - d. 2 unit telepon
 - e. 2 lemari arsip
 - f. 1 filling cabinet
 - g. Dan perlengkapan registrasi dan perkantoran standar lainnya.



2. Akses pelayanan informasi publik secara tidak langsung, melalui telepon/fax 021-384322 dan juga e-mail: ppid@Kementerian Dalam Negeri.go.id

3. Portal/ website PPID Kementerian Dalam Negeri yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat selaku pemohon informasi melalui laman <https://ppid.kemendagri.go.id>



2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dikoordinasikan oleh Kepala Pusat Penerangan selaku PPID Utama Kementerian Dalam Negeri. Secara teknis pelayanan informasi publik di Kementerian Dalam Negeri berada di Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi. Secara struktur Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi di pimpin oleh Kepala Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi yang didukung oleh Kasubbid Layanan Informasi, Data dan Dokumentasi dan Kasubbid Penyelesaian Sengketa Informasi yang memiliki tugas pokok dan fungsi secara khusus membidangi pengelolaan informasi.



Keseluruhan jumlah PNS di Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi Kemendagri berjumlah 9 orang PNS dan 4 Orang Tenaga Honorer Pelayanan Informasi Publik.

Petugas yang melayani pelayanan publik di PPID Kementerian Dalam Negeri ditetapkan melalui Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 814/125/KK/PPK/PUSPEN.3 tanggal 31 Januari 2020 tentang Pengangkatan Tenaga Lepas Pusat Penerangan sebagai tenaga dukung Pelayanan Informasi, Data dan Dokumentasi Tahun Anggaran 2019 dengan kualifikasi Pendidikan S1 Ekonomi dan S1 Komunikasi.

2.3 Anggaran Pelayanan Informasi Publik



Selama tahun 2020, Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menggunakan kegiatan pada sub-anggaran Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan PPID Kementerian Dalam Negeri sebesar **Rp 581.171.000,-**. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan tugas Pelayanan Informasi, Data dan Dokumentasi, Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dan Penyelesaian Permasalahan Sengketa Informasi.

Dalam hal memaksimalkan tugas dan fungsi PPID Kementerian Dalam Negeri selaku pembina dan pengawas pelaksanaan fungsi pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah maka ketersediaan anggaran sangat dibutuhkan. Anggaran digunakan tidak hanya dalam pelaksanaan tugas dalam meningkatkan keterbukaan informasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, tapi juga di lingkungan Pemerintah Daerah.

3.1 Jumlah Permohonan Informasi Publik

Meskipun dalam masa Pandemi Covid-19 Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi pemohon informasi baik yang mengajukan permohonan informasi melalui aplikasi PPID Kementerian Dalam Negeri, ppid@kemendagri.go.id dan permohonan informasi secara langsung. Pelayanan permohonan informasi secara langsung dilakukan oleh petugas di meja layanan dan konsultasi PPID Kementerian Dalam Negeri sehingga penyelenggaraan pelayanan publik tetap dapat berjalan efektif dengan mematuhi protokol kesehatan 3M (Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjaga Jarak). Sementara permohonan informasi yang dilakukan melalui aplikasi dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Dalam kondisi pandemi covid 19, sangat penting untuk mengeluarkan kebijakan perubahan standar pelayanan sehingga masyarakat tetap dapat mengakses pelayanan tanpa ada alasan bahwa pelayanan tidak dapat diberikan karena alasan kondisi pandemi covid 19. Untuk itu Sepanjang tahun 2020, PPID Kementerian Dalam Negeri telah memberikan pelayanan informasi secara tidak langsung kepada 359 pemohon informasi publik, dengan rincian sebanyak 229 pemohon informasi yang menyampaikan informasi melalui aplikasi ppid.kemendagri.go.id, 86 pemohon informasi menyampaikan informasi melalui mail.kemendagri.go.id.

Selain melalui aplikasi ppid.kemendagri.go.id, PPID Kementerian Dalam Negeri juga memberikan pelayanan secara langsung melalui meja layanan yang terletak di gedung B Lantai 1 Kementerian Dalam Negeri Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat. PPID Kementerian Dalam Negeri melayani baik permohonan informasi oleh individu, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun perwakilan Pemerintahan Daerah dengan setiap pemohon informasi terlebih dahulu diwajibkan untuk melakukan registrasi ke Unit Layanan Administrasi (ULA) dengan menyertakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai persyaratan yang wajib dipenuhi. Selama tahun 2020 PPID Kementerian Dalam Negeri Telah melayani sebanyak 16 perwakilan Pemerintah Daerah yang memohon informasi sekaligus asistensi kepada petugas layanan informasi di Kementerian Dalam Negeri.

**Tabel Rekapitulasi Permohonan Informasi Yang Diterima Oleh Kemendagri
melalui aplikasi ppid.kemendagri.go.id selama Tahun 2020**

NO	NAMA	TANGGAL	INFORMASI YANG DIMOHON	AKSES
1	Irham Fuadi	2 Januari 2020	Data total Anggaran Kesehatan Per Provinsi Tahun 2017 dan 2018	website
2	Firda Septia Izza Tillah	6 Januari 2020	Database Online KK dan KTP belum Update	website
3	Dinda Sholikhah	7 Januari 2020	Laporan Penerapan SPM Pendidikan	website
4	Nur Fazriyah Hasanah	9 Januari 2020	Jumlah Kementerian atau Lembaga atau Daerah di Indonesia pada Tahun 2019	website
5	Michael Rudolf Bernadus	10 Januari 2020	Permintaan Data Profile Bupati se Provinsi Papua dan Papua Barat	website
6	Michael Rudolf Bernadus	10 Januari 2020	Permintaan Data Profile Bupati se Provinsi Papua dan Papua Barat	website
7	Michael Rudolf Bernadus	10 Januari 2020	Permintaan Data Profile Bupati se Provinsi Papua dan Papua Barat	website
8	M. Afif Abdul Qoyim	16 Januari 2020	Daftar Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia di setiap Provinsi	website
9	Kamilia Cahyani	23 Januari 2020	Surat Edaran Mendagri Nomor 273/387/SJ Tanggal 19 Januari 2018 Perihal Dukungan PNS Pada KPU/KIP	website
10	Arttika Rahma Sari	30 Januari 2020	Data ukuran Pemerintah Daerah, Data Profil dan Partai Pendukung Kepala Daerah di Indonesia yang menjabat pada Tahun 2014 s/d 2018	website
11	Fuad Fauzi	31 Januari 2020	Mohon Data Kabupaten Dan Kota Untuk Setiap Propinsi	website
12	Junanda	7 Februari 2020	Contoh pembuatan Surat Keputusan Pengelola WebSite Kecamatan	website
13	Yeri Adii	24 Februari 2020	SK pelantikan DPRD Kabupaten Paniai periode 2019-2024	website
14	Agus Mote	25 Februari 2020	SK Pelantikan Bupati Paniai dan SK Pelantikan Pejabat struktural eselon III dan IV di Lingkup Kabupaten Paniai	website
15	Safaruddin	25 Februari 2020	Surat Permohonan Informasi tentang salinan beserta Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34-4791 Tahun 2016 tentang pembatalan ketentuan dari Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh	website
16	Arttika Rahma Sari	26 Februari 2020	Permohonana permintaan data untuk penelitian	website

17	Muhamad Ridwan Herdika	26 Februari 2020	Permohonan Meminta Salinan Softcopy Surat Edaran Mendagri No. 477/74054/1978 tentang Petunjuk Pengisian Kolom Agama	website
18	Mouna a.n yayasan Auriga	28 Februari 2020	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Terkait Amanat Inpres No. 8 Tahun 2018	website
19	Romadhil Fitri	28 Februari 2020	Penjelasan Permendagri No1 THN 2017 Tentang Persyaratan Administrasi Pemekaran Desa	website
20	Romadhil Fitri	28 Februari 2020	Penjelasan Permendagri No1 THN 2017 Tentang Persyaratan Administrasi Pemekaran Desa	website
21	Romadhil Fitri	28 Februari 2020	Penjelasan Permendagri No1 THN 2017 Tentang Persyaratan Administrasi Pemekaran Desa	website
22	Maudy Firdanica Asmara	2 Maret 2020	Jumlah Penduduk Per Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2018	website
23	Riana Efrilia	4 Maret 2020	Laporan Tahunan Pelayanan informasi Publik	website
24	Zulfahmi	4 Maret 2020	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	website
25	Melieana Putri	8 Maret 2020	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2018	website
26	Ahmad Erwin S.STP	9 Maret 2020	Konsultasi Kelembagaan PPID Pemprov Sulteng	website
27	Maudy Firdanica Asmara	9 Maret 2020	Permintaan dokumen mengenai jumlah penduduk per Kabupaten dan Kota di seluruh Indoensia Tahun 2018	website
28	Maria Caroline	9 Maret 2020	Calon Tunggal Pilkada dan NPHD	website
29	Kontras	10 Maret 2020	pembentukan perda yang bersifat diskriminasi yakni perbedaan berbagai aspek agama, suku, gender, ras	website
30	Indra Sukma	11 Maret 2020	Laporan Layanan Informasi Daerah Provinsi Sumatera Barat 2019	website
31	Safira Marsha Isnadiva	19 Maret 2020	Skor Penilaian Penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi	website
32	Safira Marsha Isnadiva	19 Maret 2020	Skor Penilaian Penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi	website
33	Safira Marsha Isnadiva	19 Maret 2020	Skor Penilaian Penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi	website
34	Rahadian Prajna Paramita	22 Maret 2020	Data Kependudukan di Indonesia yang terbaru	website
35	Safira Marsha Isnadiva	23 Maret 2020	Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemda Secara Nasional tahun 2015-2018	website
36	Safira Marsha Isnadiva	23 Maret 2020	Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemda Secara Nasional tahun 2015-2018	website
37	Andi Herlind Yulianti Indra	27 Maret 2020	SK	website

38	Andi Herlind Yulianti Indra	27 Maret 2020	SK	website
39	Ahmad Rukhmat	3 April 2020	Rincian keuangan pribadi	website
40	Auriga Nusantara	3 April 2020	Permohonan Informasi	website
41	Auriga Nusantara	3 April 2020	Permohonan Informasi	website
42	Miranti Eka Pramudlta	9 April 2020	Asusila	website
43	Miranti Eka Pramudlta	9 April 2020	Asusila	website
44	Miranti Eka Pramudlta	9 April 2020	Asusila	website
45	Miranti Eka Pramudlta	9 April 2020	Asusila	website
46	Nicholas David Setiawan	13 April 2020	Informasi yang dikecualikan	website
47	Muhammad Gilang Ramadhan	15 April 2020	Data Kel/Desa, Kec, Kota/Kab, Provinsi	website
48	Mohammad Eko Wahyudi	16 April 2020	Informasi Publik	website
49	Mohammad Eko Wahyudi	16 April 2020	Informasi Publik dan Kebijakan Pemkot Ternate	website
50	Aldhila Shifa Nabilla	16 April 2020	Laporan Keuangan 2019	website
51	Abdurrahman	16 April 2020	Minta Info Database e KTP	website
52	Abdurrahman	16 April 2020	Minta Info Database e KTP	website
53	Davit	16 April 2020	kehilangan Kartu Keluarga saya yang asli, mohon di bantu untuk filenya	website
54	Octa Prabandaru Rinarta	17 April 2020	Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen Pol dan Pum T.A. 2020	website
55	Nabila Azmi Rahmaningrum	17 April 2020	Informasi dan kebijakan Kementerian Dalam Negeri	website
56	Aji Setiawan	20 April 2020	kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi	website
57	Tiara Melrina	20 April 2020	Kegiatan Pelayan Informasi Publik	website
58	Srirejeki	21 April 2020	Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020	website
59	Muhammad Syamsu Hidayat	22 April 2020	Data Jamkesda Kabupaten/Kota/Propinsi yang sudah diintegrasikan ke JKN	website
60	Muhammad Syamsu Hidayat	22 April 2020	Data Anggaran Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015	website
61	Dimas Gading Arya Pradana	22 April 2020	Informasi Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2017 Dan 2018	website
62	Amu Daria	27 April 2020	Statistik Data Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Per Tahun 2019	website
63	Faizi Nurdiansyah	27 April 2020	Permohonan Informasi Magang	website
64	Sukri Aria Ganda	29 April 2020	Informasi Publik dari Badan Publik	website

65	Elim E. I. Makalmai	1 Mei 2020	Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa dan ADD oleh seluruh Desa se-Indonesia Tahun Anggaran 2018 dan 2019	website
66	Muhammad Faisal Andri	4 Mei 2020	Proyek Kerja	website
67	Muhammad Faisal Andri	4 Mei 2020	Proyek Kerja	website
68	Arianda Firmansyah	6 Mei 2020	Pedoman Penyusunan RKPD 2021	website
69	Rahmat Novriko	6 Mei 2020	Aplikasi Web PPID	website
70	Alis Kelana	8 Mei 2020	Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa dan ADD	website
71	Ano Roziqin	8 Mei 2020	NIK saya tidak ditemukan saat akan buat Akun Pencatatan Sipil Online	website
72	Galih Saefullah	11 Mei 2020	Perubahan proses perubahan No KK yang belum Terkonsol	website
73	Aulia Septiana Rachim	14 Mei 2020	Data Agrerat Kependudukan Semester II tahun 2019 Kabupaten Balangan	website
74	M. Hafiz Syawali	14 Mei 2020	Data Penduduk Desa Dan Gambaran Lokasi Desa Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan	website
75	Viano Aprilyo Ardhana	15 Mei 2020	Pengecekan NIK	website
76	Eusebius Purwadi, S.H	19 Mei 2020	Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593 / 5707 / SJ Tanggal 22 Mei 1984	website
77	Iman Sufrian S.E., M.Sc., Ak.	23 Mei 2020	Dokumen Monitoring Pencapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) Untuk Sektor Kesehatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2014 Dan 2019	website
78	Eusebius Purwadi, S.H.	24 Mei 2020	Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593/5707/sj Tahun 1984	website
79	Madjid Bati	27 Mei 2020	Surat Edaran Nomor 700/479/Otda	website
80	Henny Murtini	31 Mei 2020	Lakip TA 2018 Pemerintah Daerah se Indonesia	website
81	Arisnandana	1 Juni 2020	Sejarah Olahraga Renang	website
82	Rina Yanti	2 Juni 2020	Pembuatan Akta Kematian Orang Tua	website
83	Melieana Putri	3 Juni 2020	Data Daerah yang Mengalami Politik Dinasti	website
84	Tetty Lucyana	3 Juni 2020	Kepemendagri Tentang Penetapan Peringkat Dan Status Kinerja EPPD Tahun 2018 dan 2019	website
85	Christa Utami	4 Juni 2020	Permohonan Wawancara Serta Memperoleh Data Skripsi Secara Virtual	website

86	Saffanah Hanung Safitri	8 Juni 2020	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-251 Tahun 2018 tentang Penunjukan Penjabat Sementara Bupati Magelang Provinsi Jawa Tengah	website
87	Adli Tama Hidayat Sembiring	11 Juni 2020	Data Desa seluruh Republik Indonesia dari tahun 2014 sampai tahun 2019	website
88	Melieana Putri	14 Juni 2020	Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional	website
89	Fitrotush Sholihah	14 Juni 2020	Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 2019 Tentang Peringkat Dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2018	website
90	H. Andi Indra Jaya, SH, MM	16 Juni 2020	Surat tgl. 09 Februari 2020.	website
91	Christa Utami	17 Juni 2020	Deaft Wawancara	website
92	Qiaunita Raudatul Jannah	17 Juni 2020	Surat Penetapan Pengesahan APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	website
93	Muhammad Yudha Wibowo	19 Juni 2020	NIK e-KTP tidak aktif	website
94	Ani Rohmiyati	23 Juni 2020	Penundaan Mutasi ASN Antar Kabupaten	website
95	Muhammad Bayu Hartono	24 Juni 2020	NIK tidak valid	website
96	Muhammad Azka Nurul Fajri	24 Juni 2020	Data Rekapitulasi Jumlah Urusan Pilihan yang diselenggaran setiap Kabupaten Kota dan Jumlah LSM/Ormas di setiap Kabupaten/Kota	website
97	Fuad Rakhman	27 Juni 2020	SK Menteri Dalam Negeri	website
98	Fuad Rakhman	27 Juni 2020	Tabel Ranking Kinerja Pemerintah Daerah	website
99	Ade Irawan Taufik	29 Juni 2020	Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pembatalan 3.143 Peraturan Daerah	website
100	Ade Irawan Taufik	29 Juni 2020	Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pencabutan Sebanyak 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri	website
101	Bayu Widodo	29 Juni 2020	Kewenangan Dinas Pendidikan terhadap MI dan MT's	website
102	Fikri ardyansah	30 Juni 2020	daftar dan jumlah NGO / LSM di indonesia	website
103	Muh. Nur	30 Juni 2020	Permintaan Data Jumlah Tenaga Kerja di Tingkat Kelurahan	website
104	Fikri ardyansah	01 Juli 2020	Daftar Nama NGO (Organisasi Non Pemerintah) dan LSM di Indonesia	website
105	Rendra Wahyu Hariyono	02 Juli 2020	Permintaan Data	website
106	Muhammad Thaa	03 Juli 2020	Perbaiki Data	website

107	Zihaul Abdi	7 Juli 2020	Hasil Pemilihan Gubernur dan Bupati/Wali Kota di Seluruh Indonesia periode 2010-2018	website
108	Nurul Desyana Rahman	7 Juli 2020	Data Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah	website
109	Nurul Desyana Rahman	7 Juli 2020	Data Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah	website
110	Rendra Wahyu Hariyono	7 Juli 2020	Permintaan Data	website
111	Nurul Desyana Rahman	7 Juli 2020	Data jumlah BLUD dan Pendapatan BLUD 2015 s.d. 2019	website
112	Abraham Risyad Al Faruqi	10 Juli 2020	Daftar Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	website
113	Abraham Risyad Al Faruqi	10 Juli 2020	Daftar Pasangan Calon pada Pemilihan Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2006-2010	website
114	Feru Sena Pradana	10 Juli 2020	Analisis Kebijakan Insentif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas Kendaraan Bermotor Listrik Bertenaga Baterai di DKI Jakarta	website
115	Cantika Lila Prameswari	15 Juli 2020	Implementasi Kerja Sama Siter Province Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Indonesia) & Gyeongsangbuk-Do (Korea Selatan) Di Bidang Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	website
116	Salahudin Tunjung Seta	15 Juli 2020	Permendagri Nomor 29 Tahun 2011	website
117	Ahmad Ferdiansyah	16 Juli 2020	Apakah ada informasi soal magang atau Pekerjaan yang bisa saya dapatkan?	website
118	Tri Putranto Vindi Kusuma	17 Juli 2020	Modul Penilaian Pengusulan Badan Layanan Umum Daerah tahun 2019 (SE Mendagri Nomor 981/1011/SJ)	website
119	Jefri Faisal	18 Juli 2020	Usulan Mutasi ASN Dukcapil Aceh Tenggara	website
120	Nila Sary	20 Juli 2020	Up date data Kartu keluarga	website
121	Tri Putranto Vindi Kusuma	20 Juli 2020	Modul Penilaian Pengusulan Badan Layanan Umum Daerah tahun 2019 (SE Mendagri Nomor 981/1010/SJ)	website
122	Irhas Amrullah	20 Juli 2020	Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 108 tahun 2016	website
123	Fitrotush Sholihah	23 Juli 2020	Kepmendagri tahun 2019 (EKPPD 2018 terhadap LPPD 2017)	website
124	Rafi Alwan Ramadhan	24 Juli 2020	Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional Tahun 2015-2019	website
125	Muhammad Ihsan Maulana	24 Juli 2020	Kepala Daerah Yang Pernah Dimakzulkan	website
126	Galih Fajar Priyono	25 Juli 2020	Surat Edaran Nomor 300/3037/SJ 2018	website

127	Rio Fahriddho Rahmat	25 Juli 2020	UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu	website
128	Andi Herlind Yulianti Indra	27 Juli 2020	SK Kepegawaian	website
129	Andi Herlind Yulianti Indra	27 Juli 2020	KTP	website
130	Yuliana Nerdis	29 Juli 2020	dokumen informasi	website
131	Basyiruddin Nur	5 Agustus 2020	Softcopy LAKIP Provinsi, Kota dan Kabupaten di Indonesia TA 2015 - 2019	website
132	Fitrotush Sholihah	5 Agustus 2020	Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2018	website
133	Gulfino Guevarrato	6 Agustus 2020	Data Anggaran Otonomi Khusus di Papua dan Papua Barat 2017-2020	website
134	Erika Karolina Barus	7 Agustus 2020	Tupoksi Analisis Pengaduan Masyarakat	website
135	Rizki Ardial Z	8 Agustus 2020	Permohonan Informasi	website
136	Andi Herlind Yulianti Indra	9 Agustus 2020	SK Dan Data Kepegawaian Andi Herlin Yulianti Indra	website
137	Safira Putri Islamiati	11 Agustus 2020	Pertanyaan mengenai PKL/magang	website
138	Adi Yulianto	13 Agustus 2020	peraturan walikota no. 48 tahun 2014	website
139	Iрмаida	13 Agustus 2020	informasi laporan aksi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bogor	website
140	Billy Josef Anis	13 Agustus 2020	Data PAD Tahun 2015-2019 Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dari sumber Bank-Bank BPD untuk :1. Prov Nusa Tenggara Timur dari sumber Bank NTT. 2. Prov Jawa Barat dari sumber Bank BJB, 3. Prov DKI Jakarta sumber Bank DKI.	website
141	Rifki Patra Ufasah	18 Agustus 2020	Data jumlah penduduk seluruh kabupaten/kota tahun 2019	website
142	Tia Weldison	18 Agustus 2020	Data pemekaran daerah di Indonesia periode 1999-2019 dan data pemekaran wilayah kabupaten kota di provinsi Riau	website
143	Arif Setiawan	18 Agustus 2020	Hasil evaluasi kinerja dan kapasitas pemerintah daerah kabupaten/kota tahun 2004-2019	website
144	Budi Riswanti,S.IP	19 Agustus 2020	Perkembangan Berkas Mutasi	website
145	Sumarno	19 Agustus 2020	Permintaan Salinan SK Mendagri No. 161-19-4323 Atas Pengangkatan dan Pelantikan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung a.n. Arbiyanto, Dapil V Babel Asal Partai Demokrat	website

146	Sumarno	19 Agustus 2020	Keberatan SK Mendagri Terhadap Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung a.n. Arbiyanto, Asal Partai Demokrat, Dapil Babel V Kabupaten Bangka Barat	website
147	Fitrotush Sholihah	22 Agustus 2020	Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional tahun 2018 (EKPPD 2019 LPPD 2018)	website
148	Juan Epafroditus Maro	25 Agustus 2020	Nomor Induk Perangkat Desa	website
149	Muh. Nur	27 Agustus 2020	Jumlah penduduk yang bekerja (angkatan kerja) untuk tiap jenis profesi atau mata pencaharian pada tingkat kelurahan di wilayah Jawa Timur tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019	website
150	Angelama Talunohi	27 Agustus 2020	Realisasi Anggaran Dana Desa TA. 2017 s/d TA 2019 di kecamatan mazino Kabupaten Nias Selatan Propinsi Sumatera Utara	website
151	Aditya Agung Satrio	30 Agustus 2020	Peringkat Nasional Pemda dari tahun 2009 sampai 2019	website
152	Dony Halomoan Siregar	31 Agustus 2020	Permintaan Surat Edaran Mendagri	website
153	Tjhui Lie	2 September 2020	Revisi status perkawinan yang salah	website
154	Muslim Ritonga, SH	7 September 2020	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	website
155	Muslim Ritonga, SH	7 September 2020	Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	website
156	Alia Yofira Karunian	8 September 2020	Dokumen mengenai Pemberikan Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan	website
157	Kiki Puspita Sari	9 September 2020	Kartu keluarga	website
158	Ai Melia	10 September 2020	LAKIP	website
159	Ertati Suarni	10 September 2020	Nomor Surat: 895.3/975/BPSDM ditujukan Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang	website
160	Gigih Surya Prakasa	11 September 2020	Laporan Realisasi Belanja Daerah di Provinsi di Jawa selama 2012-2019	website
161	Andiko Mahendra	13 September 2020	APBDES	website
162	Andi Sulka Indra	13 September 2020	Nomor Kartu Keluarga	website
163	Ai Melia	14 September 2020	LAKIP	website
164	Vebruanda Wilzani Putri	17 September 2020	Kartu keluarga	website
165	Maulud Saputra	18 September 2020	Cek NIK dan No KK	website

166	Hermanus Umbu Geli	19 September 2020	Gabung akun SIM PKB saya dalam komunitas Guru Bahasa Indonesia.	website
167	Farina Rahmawati	22 September 2020	Isian Konsistensi dan Keterisian pada SIPD	website
168	Andi Chairil Furqan	24 September 2020	Nilai/Skor dan rincian hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKKPD) Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2010 – 2019	website
169	Ari Masdan, ST	28 September 2020	Rpip Kep Bangka Belitung	website
170	Axel Agastya Melodian G	28 September 2020	Informasi Nomor NIK KK	website
171	Didi Darwin	28 September 2020	Update Kartu Keluarga	website
172	Dita Hayatun Nufus	29 September 2020	Pokok Kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia - Indonesia Serta Hasil Rapat Kerja Sosek Malindo Dari 2005-2020	website
173	Erika Karolina Barus	30 September 2020	Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018	website
174	Erika Karolina Barus	30 September 2020	Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018	website
175	Ali Sumitro	1 Oktober 2020	Permintaan Data ABC	website
176	Ali Sumitro	1 Oktober 2020	Permintaan Data ABCD	website
177	Riko Tiyando	4 Oktober 2020	Perizinan Perseroan Terbatas Sandabi Indah Lestari	website
178	Iman Perbawa Mudjizat	5 Oktober 2020	Pengecekan NIK KTP	website
179	Irham Fuadi	6 Oktober 2020	Hasil penilaian SAKIP pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) tahun 2017 s.d. 2019	website
180	Rizal Fanani Abdilah	8 Oktober 2020	Permohonan Penelitian	website
181	Puspa Kusuma Pertiwi	12 Oktober 2020	Penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan Pemda nasional tahun 2018-2020	website
182	Luky Arjun Darmawan	14 Oktober 2020	Permintaan Data untuk Riset	website
183	Verryson L. Bonean	14 Oktober 2020	Regulasi pembentukan RT, RW dan Dusun	website
184	Liansuspirini Amekan	26 Oktober 2020	Nilai Sakip	website
185	Liansuspirini Amekan	27 Oktober 2020	Lakip Kabupaten Kupang	website
186	Marchelin	27 Oktober 2020	Hasil Seleksi Terbuka Calon Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Mekar Sejahtera	website
187	Riski Saputra	28 Oktober 2020	Online Dukcapil	website

188	Suwanto	30 Oktober 2020	Permendagri 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas ASN di lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah	website
189	Syaiful Amin	31 Oktober 2020	Info GIS	website
190	Khadijah Zena Septyorini	3 November 2020	Penjelasan Kerjasama Pemda dengan Pihak Ketiga (KSDPK) Berdasar PP 28/2018	website
191	Khadijah Zena Septyorini	3 November 2020	Penjelasan Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk Tanah Kasultanan DIY Yogyakarta	website
192	Amran Hanafi	6 November 2020	e-KTP	website
193	Sinta Nurul Huda	7 November 2020	Kepmendagri Tentang EKPPD Terhadap LPPD 2018 dan LPPD 2019	website
194	Irham Fuadi	9 November 2020	Penilaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	website
195	Andri Listiyani	10 November 2020	Waktu Penetapan APBD TA 2019 dan 2020	website
196	Andri Listiyani	11 November 2020	Opini Audit BPK Tahun 2018 dan 2019	website
197	Ummi Zulianti	12 November 2020	Data realisasi belanja fungsi kesehatan Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2018	website
198	Marchelin	12 November 2020	Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Mekar Sejahtera	website
199	Marchelin	12 November 2020	Dokumen Usulan Rencana Pendirian Perumda Mekar Sejahtera Di Toraja Utara	website
200	Riduan Samosir	13 November 2020	Data KK tidak ada Di BPJS kesehatan	website
201	Isnaindin Mamonto	14 November 2020	surat	website
202	Wulan Oktaviani	14 November 2020	Laporan Hasil Evaluasi Pemeringkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2019	website
203	Sendi Cipta Kurniawan	18 November 2020	Kartu Keluarga	website
204	Poni Maulani Rahmah	19 November 2020	Permohonanan Penyesuai NIK dan No KK	website
205	Liansuspirini Amekan	23 November 2020	SAKIP	website
206	Andri Listiyani	23 November 2020	Daftar Perkembangan Rancangan APBD Seluruh Provinsi Ta 2019 Dan 2020	website
207	Kanta Rio Saputra	24 November 2020	Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia Tahun 2019	website
208	Rizhaldy Pradipta	25 November 2020	APBD	website
209	Riska Amalia Sari	25 November 2020	Laporan EKPPD Seluruh kabupaten dan kota di Indonesia tahun 2018-2019	website
210	Dimas Precandro Renaldo T	25 November 2020	Kartu tanda penduduk	website
211	Bingah Amarwata Sujana	27 November 2020	Pertanyaan Mengenai BLUD dalam Permendagri 79/2018	website

212	Suci Elvionita	30 November 2020	Data Kerjasama Luar Negeri Provinsi Lampung	website
213	Rosidi	30 November 2020	Buku Pedoman Dukcapil	website
214	A X Sularmi	2 Desember 2020	Data Ibu Kandung	website
215	Bingah Amarwata Sujana	2 Desember 2020	Pertanyaan Mengenai BLUD dalam Permendagri 79/2018	website
216	Khadijah Zena Septyorini	3 Desember 2020	Penjelasan Ketentuan Permendagri 79/2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	website
217	Kriswanto	6 Desember 2020	Cek NIK	website
218	Riki Prayogi	7 Desember 2020	Nik Dan Kk Tidak Terdaftar	website
219	Rahayu Lestari	14 Desember 2020	Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2018	website
220	Alis Kelana	16 Desember 2020	laporan apbdes seluruh Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020	website
221	Fendi Setiawan	17 Desember 2020	Cek KK Online	website
222	Dikky Azhary	19 Desember 2020	Saya ingin mengajukan pendaftaran bantuan BPUM	website
223	Henry Rizki Sanjaya	22 Desember 2020	Informasi validitas NIK KTP	website
224	Dea Iswandi	29 Desember 2020	Praktik Kerja Lapangan	website
225	Dea Iswandi	29 Desember 2020	Praktik Kerja Lapangan	website
226	Ria Ayu Pertiwi	29 Desember 2020	Cek Data	website
227	Mhd. Ervival Rizqy Pane	30 Desember 2020	Peraturan Daerah Pemenuhan Dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas	website
228	Didik Siswanto	30 Desember 2020	Username Dan Password Aplikasi Penatausahaan Keuangan	website
229	Ahmad Sayuti Marpaung	31 Desember 2020	Cek Kartu Keluarga	website

**Tabel Rekapitulasi Permohonan Informasi Yang Diterima Oleh Kemendagri
melalui aplikasi mail.kemendagri.go.id selama Tahun 2020**

NO	NAMA	TANGGAL	INFORMASI YANG DIMOHON	AKSES
1	Melia Larassati	3 Januari 2020	Salinan Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Masa Jabatan Tahun 2013-2018 Serta Pengangkatan Pejabat Gubernur Jawa Barat	Email
2	Zainal Arifin	3 Januari 2020	Berdasarkan informasi yang saya peroleh, bahwa perusahaan Bapak/Ibu sedang membuka lowongan kerja. Melalui surat lamaran ini saya mengajukan diri untuk melamar kerja di perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin sebagai Technical Support Website	Email
3	Norman Fadjar Irawan	6 Januari 2020	Bersama dengan Surat Lamaran dan Daftar Riwayat Hidup yang saya kirimkan ini, saya bermaksud untuk melamar di Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin	Email
4	Nasha Puji hayani	6 Januari 2020	Sehubung dengan adanya informasi lowongan kerja diperusahan yang Anda pimpin, dengan ini saya bermaksud untuk melamar ditempat Bpk/Ibu pimpin. Saya percaya ini merupakan kesempatan esar bagi saya untuk bisa bekerja pada perusahaan Anda	Email
5	Muhamad Taufan	6 Januari 2020	Dengan ini perkenalkanlah saya mengajukan permohonan kerja kepada perusahaan yang dipimpin oleh bapak/ibu di Kemendagri	Email
6	Rijalul Furqon	6 Januari 2020	Bersama email ini saya lampirkan CV Lengkap sebagai persyaratan untuk mengisi posisi ADMINISTRASI di perusahaan Bpk/Ibu	Email
7	Raga Dimas Pradipta	7 Januari 2020	Perkenalkan diri saya, saya Raga Dimas Pradipta ingin mendaftar di perusahaan Anda sebagai Technical Support. Surat lamaran berikut saya lampirkan beserta dokumen yang dipersyaratkan. Terima kasih atas waktunya Bapak / Ibu membaca email saya	Email
8	Muhammad Ridwan	7 Januari 2020	Sesusi dengan adanya lowongan pekerjaan dari yang saya dapatkan dari situ pencarian kerja, saya bermaksut melamar pekerjaan dan bergabung ke dalam perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin	Email
9	Nanda Aditya Pratama	7 Januari 2020	Surat Lamaran Kerja	Email
10	Richi Tirta Harry Sukamto	7 Januari 2020	berminat untuk melamar lowongan kerja seperti yang telah diiklankan sebagai technical support	Email

11	Firman Syah	7 Januari 2020	Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari media internet, dengan ini saya mengajukan lamaran pekerjaan pada perusahaan yang bapak/ibu pimpin dan berikut saya lampirkan berkas lamaran pekerjaan	Email
12	Zetly S Depary	7 Januari 2020	Berdasarkan informasi lowongan kerja yang dimuat dalam akun sosial media instagram di mana dinyatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membutuhkan karyawan untuk mengisi posisi <i>TECHNICAL SUPPORT</i> , dengan surat lamaran ini saya mengajukan permohonan kerja di perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin untuk menempati posisi tersebut	Email
13	Abrar Azhari	7 Januari 2020	Dengan ini saya mengajukan surat lamaran pekerjaan pada perusahaan Bapak/Ibu pimpin, untuk mengisi posisi yang dibutuhkan, Dengan harapan saya dapan bergabung di perusahaan yang Bapak/Ibu pimpinan tersebut	Email
14	Tian Fitriani	7 Januari 2020	Dengan hormat, sesuai dengan informasi yang saya baca dari Instagram akun @jakarta_lokerr sedang membutuhkan tenaga kerja sebagai Technical Support. Maka saya Bermaksud untuk mengisi lowongan pekerjaan tersebut.	Email
15	Ahmad Hariyanto	7 Januari 2020	Perkenalkan nama saya Ahmad Hariyanto, saya lulusan S1 Teknik Informatika Universitas AMIKOM Yogyakarta tahun 2017. Email ini menunjukkan ketertarikan saya untuk melamar pekerjaan di PPID KEMENDAGRI sebagai Technical Support	Email
16	maldini sihite	7 Januari 2020	Yang terhormat Bapak/Ibu HRD Bersama e-mail ini, saya melampirkan CV lengkap beserta berkas lainnya sebagai persyaratan mengisi posisi di perusahaan Bapak/Ibu	Email
17	Rizki Mardiwan	8 Januari 2020	Surat Lamaran Kerja	Email
18	Sera Puji F	8 Januari 2020	Yth. Sdr. Ketua PPID Kementerian Dalam Negeri Perkenalkan saya Sera Puji Fitria, Lulusan Politeknik STMI Jakarta dengan jurusan Sistem Informasi Industri Otomotif dengan Indeks Prestasi Kumulatif 3.48. Saya tertarik untuk melamar pekerjaan pada posisi Technical Support. Adapun sebagai sebagai syarat melamar saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan	Email
19	Novryan, S.Kom	8 Januari 2020	Dengan ini saya ingin mengajukan diri untuk bergabung sebagai Technical Support website sesuai dengan kebutuhan Pusat Penerangan Kemendagri saat ini	Email
20	Muhammad Luthfy	8 Januari 2020	Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari media sosial Instagram tentang adanya lowongan pekerjaan di PPID Kemendagri sebagai Technical Support Website PPID Kemendagri, maka saya ingin mengajukan lamaran	Email

21	Dwi Triyanto	8 Januari 2020	Berdasarkan informasi dari media sosial, perihal lowongan pekerjaan di perusahaan tempat Bapak/Ibu pimpin. Melalui surat lamaran ini saya ingin mengajukan diri untuk melamar pekerjaan di perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin guna mengisi posisi yang dibutuhkan saat ini	Email
22	Andrian Pratama Syahrizal	8 Januari 2020	Dear Bapak/Ibu HRD PPID Kementerian Dalam Negeri Dengan surat lamaran ini saya mengajukan diri untuk bergabung dalam perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menempati posisi sebagai yang dibutuhkan pertimbangan	Email
23	Prima Diana Lestari	8 Januari 2020	Menjadi seorang profesional di perusahaan yang menawarkan suasana positif untuk mengeksplorasi teknologi dan penerapannya untuk manfaat yang lebih besar dari masyarakat di dunia bisnis	Email
24	Bambang Suryono	8 Januari 2020	Sehubungan dengan informasi yang saya peroleh dari sosial media <i>Instagram</i> bahwa diperusahaan yang Bapak/Ibu pimpin sedang membutuhkan karyawan, maka untuk itu saya mengajukan diri melamar pekerjaan untuk bergabung dengan perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin	Email
25	Rafly Taufiqurohman	8 Januari 2020	Dengan ini saya mengajukan surat lamaran kerja kepada Bapak/Ibu untuk menjadi bagian di perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin	Email
26	Abdul Basit	8 Januari 2020	Sehubungan dengan akan adanya lowongan pekerjaan di perusahaan yang bapak/Ibu Pimpin, saya bermaksud mengajukan diri agar dapat bekerja di tempat yang Bapak/Ibu pimpinan, dengan melampirkan berkas Curriculum Vitae (CV) dan akan disusul dengan berkas berkas lain setelahnya	Email
27	aldi saputra	8 Januari 2020	Saya melihat lowker via IG, jika diberi kesempatan untuk menambah dan mengasah kemampuan saya, alhamdulillahsaya memahami dasar dan lain-lain semasa kuliah, tetapi karena ilmu tidak diulang lagi bisa terhapus demi sedikit, berkenan untuk melihat CV	Email
28	Rian Kirana	8 Januari 2020	Berdasarkan informasi dari sosial media perihal lowongan pekerjaan di perusahaan tempat Bapak/Ibu pimpin. Melalui ini saya ingin mengajukan diri untuk melamar pekerjaan di Pusat Penerangan Kemendagri guna mengisi posisi Technical Support. Dengan ini saya menyertakan surat lamaran beserta CV, semoga menjadi bahan pertimbangan Bapak/Ibu pimpinan	Email
29	Hermawan Suheri	8 Januari 2020	Sehubungan dengan informasi yang saya terima via instagram seputar lowongan kerja di kemendagri, saya ingin mengajukan lamaran kerja sebagai technical support.	Email

30	Yulianti Leonita, S.T	8 Januari 2020	Berdasarkan informasi lowongan pekerjaan yang saya peroleh bahwa di perusahaan yang bapak/ibu pimpin sedang membutuhkan karyawan	Email
31	Abdullah Hafidz Rifkiansyah	8 Januari 2020	Berdasarkan info yang saya terima dari media online, bersama ini saya lampirkan CV dan data diri saya sebagai bahan pertimbangan untuk Bapak/Ibu. Besar harapan saya dapat bergabung dan bekerja di perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin	Email
32	ASRI JUMAIDI	9 Januari 2020	Menjadi seorang profesional di perusahaan yang menawarkan suasana positif untuk mengeksplorasi teknologi dan penerapannya untuk manfaat yang lebih besar dari masyarakat di dunia bisnis	Email
33	Akhmad Ghozali, S.Kom	9 Januari 2020	Berdasarkan informasi yang saya dapatkan mengenai lowongan di perusahaan Bapak/Ibu. Saya bermaksud untuk melamar di perusahaan yang bapak/ibu pimpin. Saya memiliki kemampuan untuk menganalisa sebuah proses yang sedang berjalan maupun target yang di butuhkan untuk kemajuan perusahaan	Email
34	lucas septyan	9 Januari 2020	Perkenalkan saya Lucas Septyan Putranto, lulusan S1 Manajemen dari Universitas Sebelas Maret. Saya memiliki skill yaitu Handling Complain, Mengoperasikan mesin EDC, Microsoft Excel (Vlookup, Hlookup), Microsoft Outlook, Adobe Photoshop, Komunikasi Persuasif, Mozilla Thunderbird, Open Office. Saya juga memiliki kelebihan antara lain Menjunjung tinggi integritas dalam bekerja, disiplin terhadap waktu, menyelesaikan pekerjaan sampai selesai, selalu belajar untuk mengembangkan diri di lingkungan kerja dan mengasah daya analisa secara bert	Email
35	rusdi yansyah	9 Januari 2020	Bapak dan Ibu yang terhormat berikut saya lampirkan surat lamaran perkerjaan saya agar bisa di pertimbangan kan di perusahaan Bapak dan Ibu besar harapan saya ucapkan terima kasih	Email
36	hendra liverpool	10 Januari 2020	Surat Lamaran Kerja	Email
37	Tyar Hikari	10 Januari 2020	Bersama email ini saya lampirkan CV Lengkap sebagai persyaratan untuk mengisi posisi tersebut di perusahaan Bpk/Ibu	Email
38	melia larassati	15 Januari 2020	Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian dengan hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat masa jabatan Tahun 2013-2018 serta Pengangkatan Pejabat Gubernur Jawa Barat	Email

39	Abdul aziz pratama	15 Januari 2020	Sehubungan dengan adanya penerimaan karyawan di perusahaan yang bapak/Ibu Pimpin, saya bermaksud mengajukan surat lamaran agar dapat bekerja di tempat yang Bapak/Ibu pimpin	Email
40	Ray Ayu Ningsih	17 Januari 2020	Berkenan dengan ini, saya mengajukan surat lamaran kepada Bapak/Ibu sekiranya dapat diterima sebagai karyawan di perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin	Email
41	DPP Gitran Watch Nusantara	21 Januari 2020	kami mengharapkan agar Kementerian Dalam Negeri segera Mengevaluasi Kinerja PPID Provinsi Sumatera Utara maupun PPID Kabupaten / Kota se Sumatera Utara agar cepat merespon atau memperivikasi setiap permohonan informasi yang diajukan	Email
42	PPID Bone	31 Januari 2020	Sehubungan dengan selesainya pelaksanaan pelayanan PPID Kabupaten Bone untuk tahun 2018, maka dengan ini kami sampaikan laporan sebagai hasil kinerja terkait pelaksanaan pelayanan informasi di Sekretariat PPID Utama selama Tahun Anggaran 2018 yang berada pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab.Bone	Email
43	Melia Larassati	31 Januari 2020	Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian dengan hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat masa jabatan Tahun 2013-2018 serta Pengangkatan Pejabat Gubernur Jawa Barat	Email
44	PPID Jawa Tengah	4 Februari 2020	Laporan PPID Provinsi Jawa Tengah	Email
45	Informasi Komunikasi Publik	10 Februari 2020	Bersama email ini kami kirimkan dokumen Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019.	Email
46	PPIDPROVNTT	11 Februari 2020	Permohonan Narasumber	Email
47	Eni Fajar	17 April 2020	Pemberitahuan Pemantauan dan Pendampingan Layanan Informasi Publik Darurat Kesehatan Covid-19	Email
48	Muhamad Dldik Adi Satria	28 April 2020	Bersama ini kami kirimkan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) PPID Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019	Email
49	Imparsial	3 Mei 2020	Sehubungan dengan dilaksanakannya kegiatan penelitian terkait peran ormas di Indonesia, IMPARSIAL (the Indonesian Human Right Monitor) bermaksud mengajukan permohonan permintaan dokumen berupa Salinan: Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 120 Tahun 1987 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pelajar Islam Indonesia dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 121 Tahun 1987 tentang Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Pemuda Marhaenis	Email

50	Novriko	7 Mei 2020	Berkaitan dengan proses permohonan instalasi aplikasi Web PPID melalui halaman http://ppid.kemendagri.go.id/sites/register telah kami ajukan, namun sepertinya tidak mendapat respon. Untuk itu kami mencoba mengajukan permohonan aplikasi tersebut	Email
51	Eni Fajar	13 Mei 2020	Bersamaan dengan ini kami sampaikan Rekomendasi dan Hasil Pantauan Informasi Layanan Darurat Kesehatan Covid 19	Email
52	Eni Fajar	18 Mei 2020	Undangan FGD "Pemantauan dan Pendampingan Layanan Informasi Publik Darurat Covid-19	Email
53	Vilga Viatutga Diputra	5 Juni 2020	untuk mengetahui Zona Covid 19 bisa kami akses di web mana?	Email
54	Kepaniteraan Komisi Informasi	9 Juni 2020	Penyampaian Keputusan Ketua Kip Tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi	Email
55	Kepaniteraan Komisi Informasi	11 Juni 2020	Penyampaian Keputusan Ketua KIP tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Email
56	Kepaniteraan Komisi Informasi	15 Juni 2020	Penyampaian Keputusan Ketua KIP tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Email
57	Kepaniteraan Komisi Informasi	16 Juni 2020	Penyampaian Keputusan Ketua KIP tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Email
58	Lymbarski Caesariano	17 Juni 2020	Saran Dan Keluhan Surat Pindah Keluar Dukcapil Tangerang Selatan	Email
59	Kepaniteraan Komisi Informasi	18 Juni 2020	Penyampaian Keputusan Ketua KIP tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik1	Email
60	Leonarda Archita	22 Juni 2020	Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun Anggaran 2014-2018	Email
61	PPID Setneg	23 Juni 2020	Penyampaian Surat Undangan "Webinar Perspektif Keterbukaan Informasi Publik di Era Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal)	Email
62	Deasy Andriasari	29 Juni 2020	Kepmendagri tentang penetapan peringkat dan status	Email
63	Pengaduan Kemendagri	15 Juli 2020	Permintaan File Documen Surat Edaran Mendagri Nomor 593/5707/SJ Tahun 1984	Email
64	Winni Feriana	16 Juli 2020	Surat Permohonan Pengisian Aplikasi E-Monev Kip	Email
65	Kurnia Dwi Ariyani	24 Juli 2020	Permintaan Data	Email
66	Nisan Saputra	29 Juli 2020	Informasi Tentang Alamat Lengkap, Nomor Telepon dan Alamat E-Mail Dinas Dukcapil dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi Kabupaten Bekasi	Email
67	Nisan Saputra	29 Juli 2020	Permohonan Informasi Tentang Tugas, Pokok Dan Fungsi Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri	Email

68	PPID Kemenkeu	30 Juli 2020	Undangan Seminar Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Keuangan Tahun 2020	Email
69	PPID Kemenkeu	5 Agustus 2020	Seminar Keterbukaan Informasi Publik	Email
70	Basyiruddin Nur	6 Agustus 2020	permohonan data LAKIP untuk penelitian disertai	Email
71	Ferusena Pradana	18 Agustus 2020	Permohonan Wawancara Mendalam	Email
72	Wahyudi Djafar	8 September 2020	Surat Permohonan Informasi Publik	Email
73	Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	17 September 2020	Seminar Daring Pentingnya Informasi Benar di Masa Pandemi Confirmation	Email
74	Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	18 September 2020	Seminar Daring Pentingnya Informasi Benar di Masa Pandemi starts in 1 hour	Email
75	Bangdakepeg	24 September 2020	E-Sertifikat - BimTek Pengelolaan Pengaduan Melalui SP4N-LAPOR!	Email
76	Nasokah Nasokah	25 September 2020	E-Sertifikat Sosialisasi Roadmap SP4N 21-22 September 2020	Email
77	Erwin Amirulloh	15 Oktober 2020	Permisi Bapak Ibu Sekalian Perkenalkan Saya Erwin Amirulloh, Ingin Menanyakan Bagaimana Caranya Melakukan Kritik Dan Saran Terhadap Lembaga Pemerintahan? Melalui Email Atau Semacam Surat Langsung? Mohon Jawabannya	Email
78	MD Media06	25 Oktober 2020	Rapat Koordinasi Nasional ke-11 Confirmation	Email
79	Magnitude Beyond	7 November 2020	Undangan Narasumber Webinar	Email
80	Ummi Zulianti	12 November 2020	memerlukan data mengenai realisasi belanja fungsi kesehatan pada APBD Pemerintah Provinsi di Indonesia mulai dari Tahun 2010-2018	Email
81	Beatrixaneke	19 November 2020	E-Sertifikat Webinar Tanya Jawab Keprotokolan Lingkup Kemendagri dan Pemda	Email
82	Liansuspirini Amekan Amekan	24 November 2020	permintaan informasi mengenai Hasil Review LAKIP, sampai saat ini substansi LAKIP dibawah pembinaan Kementerian PAN-RB	Email
83	Hendrayani Yani	24 November 2020	Permendagri no.18 tahun 2018 pasal 3 ayat (2) huruf f tidak berafiliasi ke partai politik	Email
84	Ummi Zulianti	24 November 2020	Terkait dengan permohonan data saya nomor 20200003078 tanggal 12 November 2020, apakah sudah ada perkembangan?	Email
85	Rahmat Tahir	30 November 2020	Permintaan Surat Edaran Mendagri Nomor 981/1011/SJ tentang Modul Penilaian dan Penetapan Badan Layanan Umum Daerah	Email
86	Muhammad Reyhan Pradipta	14 Desember 2020	Rekaman Launching Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2020	Email

**Tabel Rekapitulasi Permohonan Informasi Yang Diterima Oleh Kemendagri
melalui meja layanan selama Tahun 2020**

NO	NAMA	TANGGAL	INFORMASI YANG DIMOHON	AKSES
1	Viktor	13 Januari 2020	Permohonan Terkait Maladministrasi Pelayanan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Dusun Gerakan Dan Dusun Sebalang	Meja Layanan
2	Yohanes Kaikatui	20 Januari 2020	Permintaan Informasi Pelantikan MRPB (Majelis Rakyat Papua Barat) Yang Sudah 10 Bulan Diabaikan Oleh Gubernur Papua Barat	Meja Layanan
3	PPID Provinsi Babel	30 Januari 2020	Konsultasi Terkait Kelembagaan Dan Struktur PPID Serta Koordinasi Terkait Kebutuhan Narasumber PPID Dari Kemendagri	Meja Layanan
4	Maluku Tengah	7 Februari 2020	Konsultasi Terkait PPID dan LAPOR	Meja Layanan
5	PPID Provinsi Babel	12 Februari 2020	Konsultasi Terkait Aplikasi PPID	Meja Layanan
6	Yeri Adi	17 Februari 2020	Permohonan informasi tentang status pelantikan DPRD Kabupaten Paniai 2019-2024	Meja Layanan
7	Agus Mote	19 Februari 2020	Menanyakan Informasi Terkait Pelantikan Bupati Paniai, Pelantikan Pejabat Eselon 2-4 Yang Belum Berdasarkan SK	Meja Layanan
8	Cirebon	26 Februari 2020	Menanyakan Kelanjutan Surat Pendirian Ormas	Meja Layanan
9	PPID Provinsi Kalbar	26 Februari 2020	Konsultasi Terkait Sengketa Informasi	Meja Layanan
10	G. Heatubun	3 Maret 2020	Informasi terkait keabsahan Peraturan Daerah Kab Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2009 tentang OHOI	Meja Layanan
11	Pangkal Pinang	3 Maret 2020	Konsultasi Terkait PPID	Meja Layanan
12	Lalu Sudirman	3 Maret 2020	Meminta informasi tindaklanjut surat dari Itjen kepada Gubernur Lampung	Meja Layanan
13	PPID Kota Tangsel	4 Maret 2020	Penyerahan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tangerang Selatan Tahun 2020	Meja Layanan
14	PPID Provinsi Sulawesi Tengah	9 Maret 2020	Berkonsultasi Tentang PPID	Meja Layanan
15	PPID Kabupaten Tana Tidung	17 Maret 2020	Konsultasi Pengelolaan PPID	Meja Layanan
16	PPID Provinsi Babel	15 Juli 2020	konsultasi terkait persiapan Monev KIP tahun 2020 dan standar layanan PPID	Meja Layanan

17	Bukit Darbis Sitompul	15 Juli 2020	Melaksanakan Mediasi Permohonan Informasi An. Bukit Darbis Sitompul Perihal Tindak Lanjut Surat Dirjen Adwil No.590/551/Bak Kepada Gubernur Jawa Barat Terkait Kepastian SPH Tanah Girik Di Kecamatan Gunung Putri Yg dikuasai Oleh Universitas Trisakti	Meja Layanan
18	PPID Utama Pemerintah Provinsi Papua	17 November 2020	Terkait Permasalahan Aplikasi PPID	Meja Layanan

3.2 Jangka Waktu Layanan Informasi

Berpedoman pada Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian dalam Negeri telah mengesahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas.

Pasal 26 Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 mengatur jangka waktu pelayanan informasi adalah 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh PPID Utama wajib menyampaikan:

- Informasi yang diminta, berada di bawah penguasaannya atau tidak;
- Penerimaan atau penolakan permintaan atas informasi dengan alasan sesuai peraturan perundang-undangan;
- Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

PPID dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis. Terkait penjelasan dan standar operasional prosedur pelayanan informasi publik diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017.



3.3 Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan

Kementerian Dalam Negeri berkomitmen untuk dapat semaksimal mungkin memberikan layanan Informasi Publik kepada masyarakat. Sehingga selain melayani permohonan informasi dan konsultasi secara langsung di kantor, PPID Kementerian Dalam Negeri juga berusaha mengakomodir permohonan dengan tidak memberatkan pemohon informasi dari segi pembiayaan, yaitu dengan layanan Informasi Publik secara tidak langsung melalui aplikasi ppid.kemendagri.go.id.



Berikut hasil rekapitulasi permohonan informasi yang dikabulkan oleh Kemendagri selama tahun 2020

BULAN	JUMLAH	TINDAK LANJUT				
		SELESAI	PROSES	TOLAK	DISPOSISI	KEBERATAN
Januari	11	10	11	-	-	1
Februari	10	9	9	1	-	-
Maret	17	15	15	1	1	-
April	26	22	24	2	-	2
Mei	16	16	16	-	-	-
Juni	23	21	21	2	-	-
Juli	27	20	22	5	1	1
Agustus	22	25	21	1	1	5
September	22	18	21	1	-	3
Oktober	15	12	14	1	-	2
November	24	22	23	1	-	1
Desember	16	16	16	-	-	-
Jumlah	229	196	213	15	3	15

3.4 Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak



Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Dalam Negeri memiliki hak untuk menolak permohonan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selama tahun 2020, Kementerian Dalam Negeri telah menolak 15 Permohonan informasi.

Berikut data permohonan informasi yang ditolak oleh Kementerian Dalam Negeri selama Tahun 2020:

NO	NAMA	TANGGAL	INFORMASI YANG DIMOHON	ALASAN PENOLAKAN
1	Mouna a.n. yayasan Auriga	28 Februari 2020	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Terkait Amanat Inpres No. 8 Tahun 2018	Otoritas Instansi Lain
2	Andi Herlind Yulianti Indra	27 Maret 2020	Penyelidikan KPK	Informasi Belum Dikuasai
3	ahmad rukhmat	3 April 2020	Rincian Keuangan Rekam Jejak Dan Cacat Keuangan Dan Hukum Pribadi	Informasi yang Dikecualikan
4	Sukri Aria Ganda	29 April 2020	Alur Bisnis Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Keuangan	Otoritas Instansi Lain
5	Melieana Putri	3 Juni 2020	Data Mengenai Daerah Yang Ditengarai Terjadi Politik Dinasti di Indonesia Yang Resmi Dari Kementerian Dalam Negeri	Informasi Belum Dikuasai
6	Christa Utami	17 Juni 2020	Draft Wawancara	Otoritas Instansi Lain
7	Zihaul Abdi	7 Juli 2020	Hasil Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia Periode 2010-2018	Otoritas Instansi Lain
8	Abraham Risyad Al Faruqi	10 Juli 2020	Daftar Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Belum Didokumentasikan
9	Abraham Risyad Al Faruqi	10 Juli 2020	Daftar Pasangan Calon pada Pemilihan Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2006-2010	Otoritas Instansi Lain
10	Cantika Lila Prameswari	15 Juli 2020	Implementasi Kerja Sama Siter Province Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Indonesia) dan Gyeongsangbuk-Do (Korea Selatan) di Bidang Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Otoritas Instansi Lain
11	Jefri Faisal	18 Juli 2020	Usulan Mutasi ASN Dukcapil Aceh Tenggara	Otoritas Instansi Lain
12	Andi Herlind Yulianti Indra	9 Agustus 2020	SK Dan Data Kepegawaian Andi Herlin Yulianti Indra	Otoritas Instansi Lain
13	Dita Hayatun Nufus	29 September 2020	Pokok Kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia Serta Hasil Rapat Kerja Sosek Malindo dari 2005-2020	Otoritas Instansi Lain
14	Riko Tiyando	4 Oktober 2020	Perizinan Perseroan Terbatas Sandabi Indah Lestari	Otoritas Instansi Lain
15	Suci Elvionita	30 November 2020	Data Kerjasama Luar Negeri Provinsi Lampung	Otoritas Instansi Lain

4.1 Jumlah Keberatan Yang Diterima

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 37 bahwa Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Sepanjang Tahun 2020, PPID Utama Kementerian Dalam Negeri telah menerima 15 (lima belas) keberatan informasi yaitu:



NO	NAMA	TANGGAL	INFORMASI YANG DIMOHON	ALASAN PENOLAKAN
1	Mouna a.n. yayasan Auriga	28 Februari 2020	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Terkait Amanat Inpres No. 8 Tahun 2018	Otoritas Instansi Lain
2	Andi Herlind Yulianti Indra	27 Maret 2020	Penyelidikan KPK	Informasi Belum Dikuasai
3	ahmad rukhmat	3 April 2020	Rincian Keuangan Rekam Jejak Dan Cacat Keuangan Dan Hukum Pribadi	Informasi yang Dikecualikan
4	Sukri Aria Ganda	29 April 2020	Alur Bisnis Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Keuangan	Otoritas Instansi Lain
5	Melieana Putri	3 Juni 2020	Data Mengenai Daerah Yang Ditengarai Terjadi Politik Dinasti di Indonesia Yang Resmi Dari Kementerian Dalam Negeri	Informasi Belum Dikuasai
6	Christa Utami	17 Juni 2020	Draft Wawancara	Otoritas Instansi Lain

7	Zihaul Abdi	7 Juli 2020	Hasil Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia Periode 2010-2018	Otoritas Instansi Lain
8	Abraham Risyad Al Faruqi	10 Juli 2020	Daftar Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Belum Didokumentasikan
9	Abraham Risyad Al Faruqi	10 Juli 2020	Daftar Pasangan Calon pada Pemilihan Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2006-2010	Otoritas Instansi Lain
10	Cantika Lila Prameswari	15 Juli 2020	Implementasi Kerja Sama Siter Province Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Indonesia) dan Gyeongsangbuk-Do (Korea Selatan) di Bidang Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Otoritas Instansi Lain
11	Jefri Faisal	18 Juli 2020	Usulan Mutasi ASN Dukcapil Aceh Tenggara	Otoritas Instansi Lain
12	Andi Herlind Yulianti Indra	9 Agustus 2020	SK Dan Data Kepegawaian Andi Herlin Yulianti Indra	Otoritas Instansi Lain
13	Dita Hayatun Nufus	29 September 2020	Pokok Kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia Serta Hasil Rapat Kerja Sosek Malindo dari 2005-2020	Otoritas Instansi Lain
14	Riko Tiyando	4 Oktober 2020	Perizinan Perseroan Terbatas Sandabi Indah Lestari	Otoritas Instansi Lain
15	Suci Elvionita	30 November 2020	Data Kerjasama Luar Negeri Provinsi Lampung	Otoritas Instansi Lain

4.2 Tanggapan Atas Keberatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya



Setiap pemohon informasi yang tidak puas terhadap tanggapan yang disampaikan oleh PPID dapat menyampaikan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID. PPID Kementerian Dalam Negeri berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah.

Sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID Kementerian Dalam Negeri Sub Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi yang ditugaskan secara khusus untuk menangani sengketa informasi. Sub Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi yang merupakan bagian dari PPID Kementerian Dalam Negeri kerap berkoordinasi dengan PPID Pembantu apabila terdapat permohonan informasi yang belum ditanggapi. Hal ini dilakukan guna menghindari adanya permohonan informasi yang belum ditanggapi melewati waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Selama tahun 2020, Kementerian Dalam Negeri memiliki 1 (satu) sengketa informasi. Namun demikian untuk mengantisipasi hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri melakukan Monitoring dan Evaluasi pelayanan informasi publik di Kementerian Dalam Negeri.

4.3 Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Kepada Komisi Informasi Pusat

Setiap pemohon informasi yang tidak puas terhadap tanggapan yang disampaikan oleh PPID dapat menyampaikan keberatan kepada atasan PPID. PPID Kementerian Dalam Negeri berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi publik yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai wujud implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, PPID Kementerian Dalam Negeri memiliki Sub Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi yang ditugaskan secara khusus untuk menangani sengketa informasi. Sub Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi yang merupakan bagian dari PPID Kementerian Dalam Negeri kerap berkoordinasi dengan PPID Pembantu apabila terdapat permohonan informasi yang belum ditanggapi. Hal ini dilakukan guna menghindari adanya permohonan informasi yang belum ditanggapi melewati waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.



Sepanjang Tahun 2020, PPID Utama Kementerian Dalam Negeri terdapat hanya 1 (satu) permohonan sengketa informasi yaitu mengenai Salinan beserta Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-4791 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Dari Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh ke Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Hingga saat ini belum ada penyelesaian sengketa informasi dan masih dalam proses antara Pemohon JARI (Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia) dengan termohon Kementerian Dalam Negeri di Komisi Informasi Pusat.

4.4 Hasil Mediasi

Sepanjang Tahun 2020, PPID Utama Kementerian Dalam Negeri telah melakukan mediasi sekali a.n. Bukit Darbis Sitompul perihal Perihal Tindak Lanjut Surat Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Nomor 590/551/Bak Kepada Gubernur Jawa Barat terkait Kepastian Surat Pengakuan Hak (SPH) Tanah Girik di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang dikuasai oleh Universitas Trisakti. Hasil mediasi telah disepakati hal-hal sebagai berikut:



- a. Menurut yang bersangkutan, pada kasus dimaksud terdapat SPH tanah girik yang bermasalah karena dikeluarkan oleh Kecamatan Gunung Putri namun pihak Kecamatan Gunung Putri tidak mampu menunjukkan buku registrasi yang berkaitan dengan SPH dimaksud;
- b. Bukit Darbis Sitompul telah menyampaikan permohonan kepada Kemendagri yang ditindak lanjuti dengan Surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Nomor 590/551/BAK Tanggal 4 Februari 2019 Perihal Tanggapan Atas Surat Law Office Bukit Drs. Sitompul & Associates Hal Segera Mendesak Kepastian SPH yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat. Namun surat tersebut belum mendapatkan tanggapan dari Gubernur Jawa Barat;
- c. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Pusat Penerangan selaku PPID Utama Kemendagri akan menyurati Gubernur Jawa Barat untuk menindaklanjuti Surat tersebut untuk kemudian melaporkan kepada Pusat Penerangan Kemendagri;
- d. Terkait permohonan buku registrasi SPH tanah yang disengketakan adalah bukan kewenangan PPID Kemendagri dan akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh Bukit Darbis Sitompul kepada PPID Kabupaten Bogor.



10 tahun lebih Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik telah diundangkan namun pada kenyataannya masih banyak yang harus dilakukan untuk mewujudkan semangat keterbukaan Informasi Publik khususnya dalam lingkungan penyelenggaraan pemerintahan. Sejak tahun 2010 PPID Kementerian Dalam Negeri dibentuk, pelayanan informasi publik terus berkembang dan melakukan perbaikan dalam berbagai aspek.

Dalam setiap proses pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pusat Penerangan akan selalu berkoordinasi dengan PPID Pembantu dari setiap komponen dan unit di Kementerian Dalam Negeri.

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi public di PPID Utama Kemendagri sebagai berikut:

1. Masih adanya anggapan bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi merupakan tugas tambahan yang membebani tugas utama komponen dan unit. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman akan pengelolaan pelayanan informasi publik dan keterbukaan informasi. Perubahan nomenklatur dan penyegaran organisasi juga mempengaruhi pelaksanaan pelayanan informasi karena berdampak pada perubahan *person in charge* yang dibarengi dengan sosialisasi yang harus dimulai dari awal setiap ada pergantian orang dalam Jabatan yang baru;
2. Dengan adanya kondisi Pandemi Covid 19 yang mengurangi kegiatan Sosialisasi maupun Bimtek bagi PPID Pembantu sehingga menimbulkan Pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik belum secara merata diimplementasikan di seluruh Komponen yang ada di lingkup Kementerian Dalam Negeri;
3. PPID Pembantu masih belum memahami klasifikasi Daftar Informasi Publik. Selain itu belum tercapainya pemahaman yang baik tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan. Sehingga PPID Pembantu cenderung ragu untuk menyampaikan Daftar Informasi yang Dikecualikan;
4. Respon PPID Pembantu di Kementerian Dalam Negeri dalam menjawab setiap permohonan informomasi publik masih kurang responsive dan cepat;
5. Masih kurangnya respon masyarakat dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan juga masih adanya berbagai organisasi masyarakat yang memanfaatkan Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan. Untuk itulah, diperlukan sosialisasi dan Bimtek kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui bahwa dewasa ini akses informasi publik sangat mudah didapatkan melalui PPID pada masing-masing badan publik.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2020, Kementerian Dalam Negeri telah memetakan langkah rencana tindak lanjut peningkatan kualitas layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

1. Melakukan revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah berdasarkan masukan Pemerintah Daerah dalam rapat yang telah dilaksanakan selama tahun 2020. Hal-hal yang direvisi dalam peraturan tersebut utamanya yang menyangkut struktur kelembagaan PPID di tingkat Kabupaten/Kota yang semula melekat pada jabatan struktural Eselon III yang membidangi Pengelolaan informasi, dokumentasi dan kehumasan, menjadi pejabat Eselon II;
2. Menginventarisir permasalahan pada Permendagri No. 3 Tahun 2017, khususnya dalam hal penyediaan SOP dan disesuaikan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, PP Nomor 61 Tahun 2010 dan Perki Standar Layanan Informasi Publik;
3. Melakukan asistensi peningkatan kualitas layanan informasi publik pada 5 Provinsi berdasarkan hasil monev Keterbukaan Informasi tahun 2020, yaitu Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Maluku, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Mengembangkan sistem layanan informasi publik berbasis android yang dapat melalui telepon genggam. Aplikasi dimaksud merupakan aplikasi yang terintegrasi dengan aplikasi website ppid.kemendagri.go.id;
5. Mengembangkan fitur-fitur layanan informasi publik pada aplikasi kemendagri.go.id. yaitu fitur chatting, fitur unggah dokumen pendukung, template sapaan, pengaturan waktu dan alarm serta fitur-fitur lain yang telah diinventarisir sesuai dengan kebutuhan layanan informasi.

